

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR.....	iv
PANITIA UJIAN TERTUTUP.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
ABSTRACT.....	xvi
RINGKASAN.....	xvii
SUMMARY.....	xxiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.....	xxx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA LAIN.....	xxxii
DAFTAR KONVENSI INTERNASIONAL.....	xxxiii
DAFTAR TABEL.....	xxxiiii
DAFTAR KASUS DAN PUTUSAN PENGADILAN.....	xxxv
DAFTAR ISI.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Tujuan Penelitian.....	17
3. Manfaat Penelitian.....	19
4. Metode Penelitian.....	20
5. Originalitas Penelitian.....	25
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	29
BAB II JUSTIFIKASI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK PETANI.....	31
1. Justifikasi Pengakuan dan Perlindungan HKI.....	31

2. Justifikasi Pengakuan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional.....	36
3. Justifikasi Pengakuan dan Perlindungan Hak Petani.....	43
 BAB III PRINSIP HUKUM PERLINDUNGAN HAK PETANI ATAS VARIETAS TANAMAN DALAM BERBAGAI KONVENSI INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL.....	
1. Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani Atas Varietas Tanaman dalam Berbagai Konvensi Internasional.....	49
A. <i>the International Under Taking on Genetic Plant Resources for Food and Agriculture(IUTPRFGA)</i>	49
B. <i>United Nations Convention on Biological Diversity(CBD)</i>	53
C. <i>The International Union For Protection Of New Varieties Of Plant Varieties(UPOV)</i>	60
D. <i>The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)</i>	76
E. <i>TRIPs</i>	84
2. Prinsip Hukum Perlindungan Hak Petani Atas Varietas Tanaman dalam Hukum Nasional.....	92
A. Undang- Undang RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.....	95
B. Undang- Undang RI No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.....	110
C. Undang- Undang RI No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.....	126

D. Undang- Undang RI No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	130
---	-----

BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HAK PETANI ATAS VARIETAS

TANAMAN YANG MENJAMIN KEADILAN.....	135
--	------------

1. Lingkup Teknologi.....	125
2. Hak Substantif Petani.....	139
3. Proposal Perubahan Penafsiran Pasal 27 ayat (3) b TRIPs oleh Negara-Negara Berkembang.....	144
4. Best Practice Perlindungan Hak Petani di Berbagai Negara.....	148
A. India.....	148
B. Negara-Negara Afrika.....	160
C. Malaysia.....	164
5. Bentuk Perlindungan Hak Petani atas Varietas Tanaman dalam Hukum Nasional yang Menjamin Keadilan.....	167

BAB V PENUTUP.....	187
---------------------------	------------

1. Kesimpulan.....	187
2. Saran.....	191

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar RI Tahun 1945(Amandemen I,II,III,IV)

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,(Lembaran Negara RI Nomor 46 tahun 1992,Tambahan Lembaran Berita Negara No. 3478):

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity), (Lembaran Negara RI Tahun 1994 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3556).

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on Establishing the World Trade Organization/WTO), Lembaran Negara RI Nomor 95 tahun 1994, Tambahan Lembaran Berita Negara nomor 3564;

Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman , (Lembaran Negara RI Nomor 242 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara No.4043);

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, (Lembaran Negara RI Nomor 109 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture , (Lembaran Negara RI Nomor 23 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4613);

Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, (Lembaran Negara RI Nomor.131Tahun 2013, Tambahan Berita Lembaran Negara No.5433);

KEPUTUSAN PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan establishing the World Intellectual Property Organization*

Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA LAIN

Law of India, Act 53 Of 2001, The Protection Of Plant Varieties And Farmer's' Rights Act, 2001

Laws Of Malaysia, Act 634, Protection Of New Plant Varieties Act 2004

African Model Legislation for Protection of The Rights of Local Communities, Farmers, and Breeders and for Regulation of Access to Biological Resource, 2004



DAFTAR KONVENSI INTERNASIONAL

Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) of 1994.
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C,
15 April 1994, 33.I.L.M1197. 1201(entered into force on 1 st January 1995)

Convention On The Rights Of The Child,1989 adopted by UN General Assembly,
entered into force 1990 <http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm>

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(ICESCR), opened for
signature 16 December 1996, 999 UNTS 3 (entered into force on 3 January
1976) <http://www.ohchr.org/english/law/cescr.htm>

International Treaty on Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA),
opened for signature 3 November 2001,entered into force on 29 June 2004))

*The United Nations Convention on Biological Diversity,done at Rio de Janeiro, 5 June
1992, 31. ILM 822*

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, dokumen
WIPO/GRTKF/IC/12/INF/6

The United Nation Universal Declaration of Human Rights (UDHR),
GA.Res.217A(III) UN GAOR, 3rd sess., supp. UN.Doc. A/810 (1948).

*The International Under Taking on Genetic Plant Resources for Food and Agriculture(
IUTPRFGA*,Resolution 8/83 of the Twenty Second session of the FAO
Conference, Rome, 5-23 November, 1983.

The International Union for Protection of new Varieties of Plants, December 2,1961, as
revised at Geneva on November 10, 1972, on October 23, 1978 and on March
19, 1991.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sejarah dan perkembangan pertukaran sumberdaya genetic tanaman.....	43
Tabel 2 Perbandingan Perlindungan Varietas Tanaman Menurut Konvensi UPOV 1978 dan 1991.....	70
Tabel 3 Konvensi Internasional Yang Terkait Dengan Pengaturan Sumberdaya Genetik Dan Hak Petani Atas Varietas Tanaman.....	90
Tabel 4 Perbandingan Hak Petani dan HKI.....	139
Tabel 5 Proposal Yang Diajukan Negara-negara Berkembang Terhadap Penafsiran Ulang Pasal 27 ayat (3) b TRIPs.....	145
Tabel 6 Hal-Hal Yang Harus Diatur Dalam Undang-Undang Perlindungan Hak Petani Atas Varietas Tanaman Pada Masa Yang Akan Datang.....	184

DAFTAR KASUS DAN PUTUSAN PENGADILAN

Darcy v Allin.....	93
Diamond v Chakrabarty, 447 U.S.380 (1980).....	95
Van der Lely v. Bamford.....	102
Technograph v. Mills & Rockey.....	103
the Red Dove (Rote Taube.....	137
Harvard Oncomouse.....	139
Ciba – Geigy (T 49/83).....	139
Petikan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 13/Fid.B/2005/PN.Ngjk.....	16
Putusan Mahkamah Konstitusi No.99/PUU-X/2012.....	130